



# LKIP 2025

LAPORAN KEGIATAN INSTANSI PEMERINTAH

KECAMATAN  
PONDOKGEDE

2026



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Disiapkan oleh:

Tim Perencanaan  
Kecamatan Pondokgede

[kec-pondokgede.bekasikota.go.id](http://kec-pondokgede.bekasikota.go.id)

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya Kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi pada tahun 2025

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan perencanaan dan pembangunan secara baik dan benar didasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku dan menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan responsif. Selain itu menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyangkut kinerja instansi pemerintah sehingga terciptanya kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah.

Namun dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun ini Kecamatan Pondokgede dapat melihat pencapaian kinerjanya yang tertuang di dalam Renstra 2025-2029 dan Perjanjian Kerja Tahun 2025/2026.


Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun berikutnya periode Renstra 2025-2029 yang dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang telah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dalam upaya memenuhi penyelenggaraan instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dimaksudkan untuk :

- A. Menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar yang dilandasi Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- B. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan responsif;
- C. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyangkut kinerja instansi pemerintah;
- D. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi yang memiliki kewenangan dalam pemerintahan khususnya pada perencanaan pembangunan daerah yang berperan penting dalam konstelasi perencanaan pembangunan di Kota Bekasi. Peran tersebut sangat terlihat pengaruhnya pada dinamika pembangunan di Kota Bekasi, baik yang lokal , regional dan nasional. dapat dilakukan melalui beragam aspek, yaitu aspek penguatan integrasi, aspek sosialisasi , aspek pemerintahan umum dan aspek pembinaan aparatur yang terkait dalam perencanaan pembangunan di Kota Bekasi.

Dengan telah tersusunya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunya LKIP ini , dan dapat memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi untuk peningkatan manajemen Kinerja yang lebih baik.

Bekasi, 31 Januari 2026  
**CAMAT PONDOKGEDE.**  
  
**ZAINAL ABIDIN SYAH, S.T., M.M**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720616 199903 1 008

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	3
1.1 LATAR BELAKANG .....	3
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI.....	8
1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	15
1.4 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI .....	17
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	28
2.1 RENCANA STRATEGIS .....	29
2.1.1 TUJUAN DAN SARANA PERANGKAT DAERAH.....	30
2.1.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	31
2.2 PERJANJIAN KINERJA.....	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	37
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	38
3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	39
3.2.1 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA :	
MENINGKATNYA LKM YANG MENDUKUNG PELAYANAN	
PUBLIK DI KECAMATAN PONDOKGEDE.....	40
A. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA	
CAPAIAN KINERJA TAHUN INI.....	40
B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN	
TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH	
YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN	
STRATEGIS ORGANISASI.....	43
C. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN	
PERSENTASE LKM AKTIF YANG MENDUKUNG	
PELAYANAN PUBLIK.....	45

D.	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL (JIKA ADA).....	45
E.	ANALISA REALISASI DAN PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.....	46
3.2.2	PERSENTASE PENINGKATAN KEPUASAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PONDOKGEDE.....	54
A.	PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET KINERJA TAHUN INI.....	54
B.	PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR.....	56
C.	PERBANDINGAN ANTARA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR.....	57
D.	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029.....	58
E.	PERBANDINGAN ANTARA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR.....	59
F.	ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN KINERJA SERTA FAKTOR PERMASALAHAN.....	60
G.	ANALISA PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA, REALISASI ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	62
H.	ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNA SUMBER DAYA.....	67
I.	INFOGRAFIS TENTANG INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DARI 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	68
BAB IV	PENUTUP .....	70
4.1	KESIMPULAN.....	70
4.2	RENCANA TINDAK LANJUT .....	73

## DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	JUMLAH PEGAWAI MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN.....	10
TABEL 1.2.	JUMLAH ASN KECAMATAN PONDOKGEDE BERDASARKAN GOLONGAN , ESELON DAN JABATAN .....	11
TABEL 1.3.	JUMLAH PEGAWAI PNS KECAMATAN PONDOKGEDE BERDASARKAN PENDIDIKAN.....	12
TABEL 1.4.	JUMLAH PEGAWAI PPPK KECAMATAN PONDOKGEDE BERDASARKAN PENDIDIKAN.....	12
TABEL 1.5.	JUMLAH PEGAWAI NON-ASN KECAMATAN PONDOKGEDE BERDASARKAN PENDIDIKAN.....	13
TABEL 1.6.	PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN PONDOKGEDE TAHUN 2025.....	18
TABEL 2.1	PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN PONDOKGEDE TAHUN 2025.....	34
TABEL 2.2	PAGU ANGGARAN KECAMATAN PONDOKGEDE TAHUN 2025.....	31
TABEL 2.3	SASARAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET KINERJA PER LIMA TAHUN.....	36
TABEL 3.1	TARGET CAPAIAN KINERJA MENURUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PONDOKGEDE KOTA BEKASI TAHUN 2025.....	38
TABEL 3.2	TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PONDOKGEDE TAHUN 2025 KECAMATAN PONDOKGEDE.....	39
TABEL 3.3	PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR.....	58
TABEL 3.4	DATA UNSUR LKM SE KECAMATAN PONDOKGEDE.....	42
TABEL 3.5	ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PERSENTASE LKM AKTIF YANG MENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK.....	43
TABEL 3.6	PENGHITUNGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025.....	45
TABEL 3.7	REALISASI ANGGARAN DAN ANALISA CAPAIAN SERTA EFISIENSI PROGRAM KEGIATAN.....	47
TABEL 3.8	PERHITUNGAN PENINGKATAN KEPUASAN MASYARAKAT DI KECAMATAN.....	55
TABEL 3.9	PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN RELAISASI KINERJA TAHUN 2025.....	55
TABEL 3.10	PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN PERSENTASE PENINGKATAN KEPUASAN MASYARAKAT DI KECAMATAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA.....	56
TABEL 3.11	PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PERSENTASE PENINGKATAN KEPUASAN MASYARAKAT DI KECAMATAN DENGAN TAHUN LALU.....	57
TABEL 3.12	PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN PERSENTASE PENINGKATAN KEPUASAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PONDOKGEDE TARGET RENSTRA 2025-2029.....	58
TABEL 3.13	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KECAMATAN PONDOKGEDE	59

	PERSENTASE PENINGKATAN KEPUASAN MASYARAKAT DI KECAMATAN DENGAN STANDAR NASIONAL (RPJMN TAHUN 2025-2029).....	
TABEL 3.14	PROGRAM/KEGIATAN MENUNJANG INDIKATOR PERSENTASE PENINGKATAN KEPUASAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PONDOKGEDE TAHUN ANGGARAN 2025.....	62
TABEL 4.1	PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025.....	70

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN	14
GAMBAR 1.2	PETA WILAYA KECAMATAN PONDOKGEDE	15
GAMBAR 2.1	INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PONDOKGEDE TAHUN 2025-2029	32
GAMBAR 3.2	INFOGRAFIS TENTANG INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DARI 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA	68



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hasil realisasi fisik dan keuangan kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome yang sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam melakukan pelaksanaan program dan kegiatan kerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran terkait pencapaian tujuan mau sasaran instansi pemerintah sebagai jbaran dari rencana strategis instansi pemerintah yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan maupun tingkat kegagalan dalam melakukan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Pondokgede atas penyelenggaraan program kegiatan pada tahun 2025 yang sekaligus menjadi masukan dan pengambilan Keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan menyajikan hasil pengukuran kinerja yang merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Pondokgede yang telah dilaksanakan tahun 2025, pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target dari setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.

Sementara jika dibandingkan dengan target perencanaan satu tahun, maka terlihat bahwa pada tahun 2025 ini hampir keseluruhan target yang telah ditetapkan telah tercapai. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator kinerja sasaran yang telah



dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 khususnya Tahun Anggaran 2025 terpenuhi sesuai dengan harapan.

Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan pembinaan dan komitmen kuat dari seluruh pihak aparatur mulai dari Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah, sekretaris Lurah, Kasi Kecamatan dan Kelurahan beserta Kasubag Keuangan dan Kasubag Tata usaha dalam seluruh pelaksana di lingkungan Kecamatan Pondokgede dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan prinsip efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu sebagai Upaya efektifitas pelaksanaan kegiatan telah dilakukan sinergi dan kolaborasi antar seksi Kecamatan Pondokgede antara lain :

1. Sub Bagian Tata Usaha
  - Dukungan Perencanaan;
  - Dukungan Sarana dan Prasarana untuk mendukung Kinerja aparatur;
  - Dukungan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Keuangan
  - Dukungan Pengelolaan data anggaran dan realisasi anggaran untuk mendukung kinerja.
3. Seksi Kesejahteraan
  - Dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
  - Dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu seperti umkm yang ada di wilayah Kecamatan Pondokgede;
  - Dukungan dalam pembangunan infrastruktur yang berhubungan dengan perekonomian seperti perbaikan jalan, jembatan, saluran melalui musrenbang Kelurahan dan Kecamatan dan sarana prasarana pelayanan yang ada di Kecamatan Pondokgede
5. Seksi Pemerintahan
  - Dukungan dalam proses membantu penyusunan dan pengawasan kebijakan serta regulasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah , seperti SK pelayanan publik dan SOP.
6. Seksi Kenteraman dan Ketertiban (Trantib)
  - Dukungan dalam mengawasi berbagai kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban, seperti penertiban di titik lokasi yang belum tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Dukungan dalam penyelesaian konflik sosial masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan atau tindakan yang mengganggu ketenteraman masyarakat.
7. Seksi Pemerintahan
  - Dukungan dalam kerja sama dengan Lembaga dan organisasi masyarakat untuk mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Pondokgede ini dibuat dalam rangka perwujudan, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Sejalan dengan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan LKIP Pemerintah Kota Bekasi berpendoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, baik setiap instansi Pemerintah pusat maupun daerah Menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan.



Sesuai dengan periode 2025-2029 Kota Bekasi, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Kecamatan Pondokgede terdapat dalam Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi yaitu Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

Tujuan dan sasaran RPJMD 2025 – 2029 Pemerintah Kota Bekasi diuraikan dalam 5 tujuan strategis yang menjadi 5 poin utama dalam pembangunan yaitu terdiri dari :

- Tujuan 1: Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari
- Tujuan 2: Terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya, humanis dan harmonis
- Tujuan 3: Terwujudnya struktur ekonomi Kota Bekasi yang tangguh dan inklusif
- Tujuan 4: Terwujudnya iklim investasi Kota Bekasi yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
- Tujuan 5: Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif

Rencana Kinerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2025. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Pondokgede tahun 2025 dimaksudkan untuk menyusun capaian kinerja organisasi Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan.



---

Sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi, Kecamatan Pondokgede sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Percepatan dan peningkatan pembangunan wilayah menimbulkan pengaruh yang cukup besar, baik secara fisik maupun non fisik di wilayah Kecamatan Pondokgede, hal ini terlihat dari beberapa faktor yang menentukan, diantaranya yaitu :

1. Tingkat pertumbuhan pemukiman baru yang sangat tinggi di wilayah Kecamatan Pondokgede dapat menimbulkan penambahan penduduk dan berkembangnya berbagai permasalahan kependudukan;
2. Tingkat pertumbuhan sarana dan sarana transportasi, perbelanjaan dan Listrik semakin meningkat;
3. Tingkat kebutuhan prasarana sosial seperti prasarana peribadatan, Pendidikan dan Kesehatan semakin meningkat;
4. Karakteristik dan dinamika kehidupan masyarakat semakin tinggi dikarenakan memiliki keterpaduan antara kehidupan pedesaan dan perkotaan.

Rencana Kinerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2025. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Pondokgede tahun 2025 dimaksudkan untuk menyusun capaian kinerja organisasi Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah (LKIP) Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi adalah sebagai sarana bagi Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dalam menyampaikan pertanggung jawaban kinerja pada seluruh pemangku kepentingan (Wali Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan



kepada Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mewujudkan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi pada pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat di seluruh wilayah Kecamatan Pondokgede dan Kota Bekasi;

2. Menjadikan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tenang, tertib, dan kondusif;

3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi untuk membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kecamatan Pondokgede dan Kota Bekasi terhadap penyelenggara Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi;

5. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur terhadap kinerjanya sehingga dapat berperan secara efektif dan responsif terhadap administrasi dalam pemerintahan dan membantu pelayanan kepada Masyarakat yang lebih baik;

6. Menjadikan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dalam melakukan perencanaan anggaran yang lebih efektif pada tahun berikutnya;

7. Menjadikan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dalam proses manajemen administrasi yang sesuai dengan peraturan administrasi yang berlaku;

8. Menjadikan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dalam melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang ada, serta



---

menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Penyusunan LKIP Kecamatan Pondokgede Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pondokgede dalam satu tahun yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029. IKU Kecamatan Pondokgede berkaitan langsung dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi maupun Sasaran yang ada pada Renstra Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokgede, yaitu : Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik.
2. Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan Pondokgede, yaitu : Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

Jika melihat capaian indikator kinerja utama Kecamatan Pondokgede pada tahun 2025 dimana Indikator Nilai AKIP di Kecamatan Pondokgede memperoleh capaian kinerja sebesar 77.29, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat memperoleh capaian kinerja sebesar 85.74, dan Persentase Zonasi yang Tertib, Bersih dan Indah Di Kecamatan Pondokgede mencapai 42.85%, dikarenakan adanya Renstra Kecamatan Pondokgede yang menyesuaikan dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ,Kecamatan Pondokgede harus bisa lebih meningkatkan kinerja yang sudah tercapai pada tahun 2025 maupun terhadap peningkatan target yang telah ditetapkan pada renstra tahun 2024-2026.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komperhensif mengenai kinerja Kecamatan Pondokgede pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat , akan kami bahas pada BAB III (AKUNTABILITAS KINERJA) pada laporan kinerja Kecamatan



Pondokgede tahun 2025 ini.

## **1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI**

Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) Kota Bekasi di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi, kecamatan di kategorikan sebagai territorial *organization* serta memiliki kewenangan dalam pemerintahan khususnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan yang berperan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat di Kota Bekasi. Peran tersebut sangat terlihat pengaruhnya pada dinamika pembangunan di Kota Bekasi, baik yang berdimensi lokal, regional, dan nasional. Untuk mendukung semua itu, seluruh daya upaya dilakukan melalui beragam aspek, yaitu aspek penguatan integrasi, aspek sosialisasi, aspek pemerintahan umum, dan aspek pembinaan aparatur.

Untuk menjalankan kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi kerja Kelurahan tersebut , terlihat jelas pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kelurahan Kota Bekasi.

Kecamatan Pondokgede memiliki 5 (lima) kelurahan yaitu :

- i. Kelurahan Jatiwaringin;
- ii. Kelurahan Jatimakmur;
- iii. Kelurahan Jatibening;
- iv. Kelurahan Jaticempaka;
- v. Kelurahan Jatibening Baru.



Kedudukan Kecamatan Pondokgede dipimpin oleh Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada WaliKota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan Masyarakat, Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan yang mengelola Perencanaan, Kepegawaian dan keuangan serta camat didukung oleh 5 (lima) Seksi dan Kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Kota Bekasi, Camat memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan;
4. Pengoordinasian kegiatan sosial kemasyarakatan;
5. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
6. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
7. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
8. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
9. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kota yang ada di Kecamatan;
11. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota;
12. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
13. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dalam melaksanakan tugasnya, Camat dibantu Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Lurah dan pejabat struktural sebagai berikut :

1. Camat, membawahkan :
2. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
  - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
  - c. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
  - d. Kepala Seksi Pemerintahan;
  - b. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
  - c. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. Lurah
  - a. Sekretaris Kelurahan;
  - b. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
  - c. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan.

Keseluruhan jumlah pegawai kecamatan Pondokgede Kota Bekasi yang di dalamnya terbagi Atas satu Ke sekretariat, lima Seksi, dua sub bagian, dan Tenaga Non ASN (NON-ASN) sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai menurut status Kepegawaian**

URAIAN	JUMLAH	PRESENTASE
PNS	51 Pegawai	26,29%
PPPK	110 Pegawai	56,70%
NON-ASN	33 Pegawai	17,01%
<b>Jumlah</b>	<b>194 Pegawai</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data kepegawaian sub bagian tata usaha kecamatan pondokgede*

Dari tabel tersebut di atas, sebanyak 110 Orang atau 56,70 % dari seluruh jumlah pegawai di Kecamatan Pondokgede sudah berstatus (PPPK) Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja pada pengangkatan per-bulan Juli 2025. Tenaga kontrak kerja masih dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pondokgede.



**Tabel 1.2.**

**Jumlah ASN Kecamatan Pondokgede Berdasarkan Golongan, Eselon dan Jabatan**

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	Golongan				Eselon			
			IV	III	II	I	IV	III	II	I
1	CAMAT	1	1	-	-	-	-	1	-	-
2	SEKRETARIS CAMAT	1	-	1	-	-	-	1	-	-
3	KASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	1	1	-	-	-	1	-	-	-
4	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	-	1	-	-	1	-	-	-
5	KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	1	1	-	-	-	1	-	-	-
6	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1	1	-	-	-	1	-	-	-
7	KASI PEMERINTAHAN	1	-	1	-	-	1	-	-	-
8	KASUBAG KEUANGAN	1	-	1	-	-	1	-	-	-
9	KASUBAG TU	1	-	1	-	-	1	-	-	-
10	LURAH JATIWARINGIN	1	-	1	-	-	1	-	-	-
11	LURAH JATIMAKMUR	1	-	1	-	-	1	-	-	-
12	LURAH JATIBENING	1	-	1	-	-	1	-	-	-
13	LURAH JATICEMPAKA	1	-	1	-	-	1	-	-	-
14	LURAH JATIBENING BARU	1	-	1	-	-	1	-	-	-
15	SEKRETARIS KELURAHAN	5	-	5	-	-	5	-	-	-
16	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	5	-	5	-	-	5	-	-	-
17	KASI PEMERINTAHAN DAN TRANTIBUM	5	-	5	-	-	5	-	-	-
18	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN	5	-	5	-	-	5	-	-	-
19	STAF PELAKSANA	17	-	10	7	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>40</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber : Data Diolah dari Sistem Informasi Aparatur Kota Bekasi Tahun 2025

Dari tabel di atas terdapat jumlah pegawai ASN di Kecamatan Pondokgede yaitu 53 Orang.



**Tabel 1.3.**

**Jumlah Pegawai PNS Kecamatan Pondokgede Berdasarkan Pendidikan**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
		TOTAL
1	S3	-
2	S2	10
3	S1	33
4	DI/DII/DIII	1
5	SMA/SMK	-
6	SD	-
<b>TOTAL</b>		<b>43</b>

*Sumber : Data Diolah dari Sistem Informasi NON ASN Kota Bekasi Tahun 2025*

**Tabel 1.4.**

**Jumlah Pegawai PPPK Kecamatan Pondokgede Berdasarkan Pendidikan**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
		TOTAL
1	S3	-
2	S2	-
3	S1	59 Orang
4	DI/DII/DIII	6 Orang
5	SMA/SMK	45 Orang
6	SD	-
<b>TOTAL</b>		<b>140 Orang</b>

*Sumber : Data Diolah dari Sistem Informasi NON ASN Kota Bekasi Tahun 2025*



**Tabel 1.5.**

**Jumlah Pegawai NON-ASN Kecamatan Pondokgede Berdasarkan Pendidikan**

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
		TOTAL
1	S3	-
2	S2	-
3	S1	8
4	D.III	-
5	SMA/SMK	18
6	SD	-
TOTAL		33 Orang

Sumber : Data Diolah dari Sistem Informasi NON ASN Kota Bekasi Tahun 2025.

Dari tabel di atas terdapat jumlah pegawai NON ASN di Kecamatan Pondokgede yaitu 140 Orang berdasarkan Pendidikan pada tahun 2025.

**Tabel 1.6.**

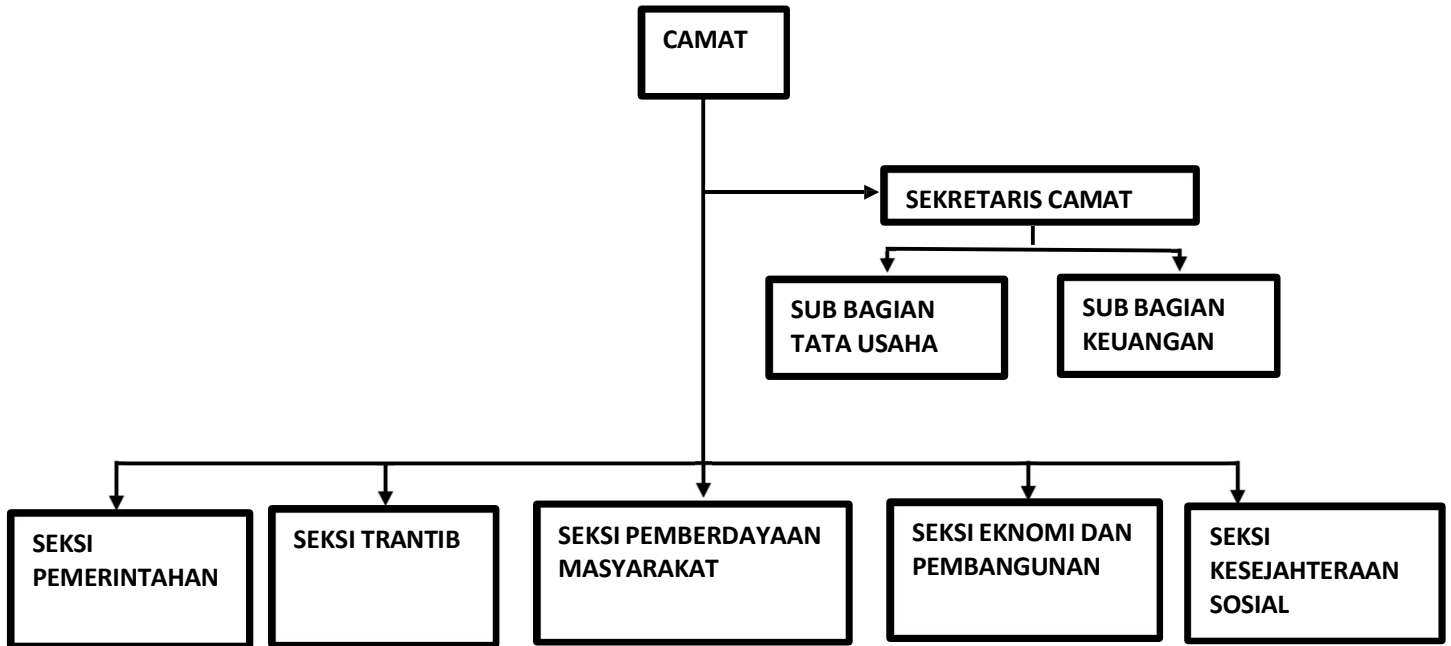
**Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Pondokgede**

No	JENIS /NAMA BARANG	SATUAN	KONDISI			JUMLAH
			BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT	
1	Gedung dan Bangunan	Unit	135	-	-	135
2	Kendaraan Roda 4	Buah	12	-	-	12
3	Kendaraan Roda 2	Buah	26	-	-	26
4	Komputer	Unit	175	-	-	175
5	Printer	Unit	165	-	-	165
6	Mesin Ketik	Unit	1	-	-	1
7	Infocus	Unit	7	-	-	7
8	Air Conditioner	Unit	95	-	-	95
9	Lemari	Buah	225	-	-	225
10	Meja	Buah	115	-	-	115
11	Kursi	Buah	110	-	-	110
12	LCD	Buah	3	-	-	3
13	Laptop	Unit	1	-	-	1

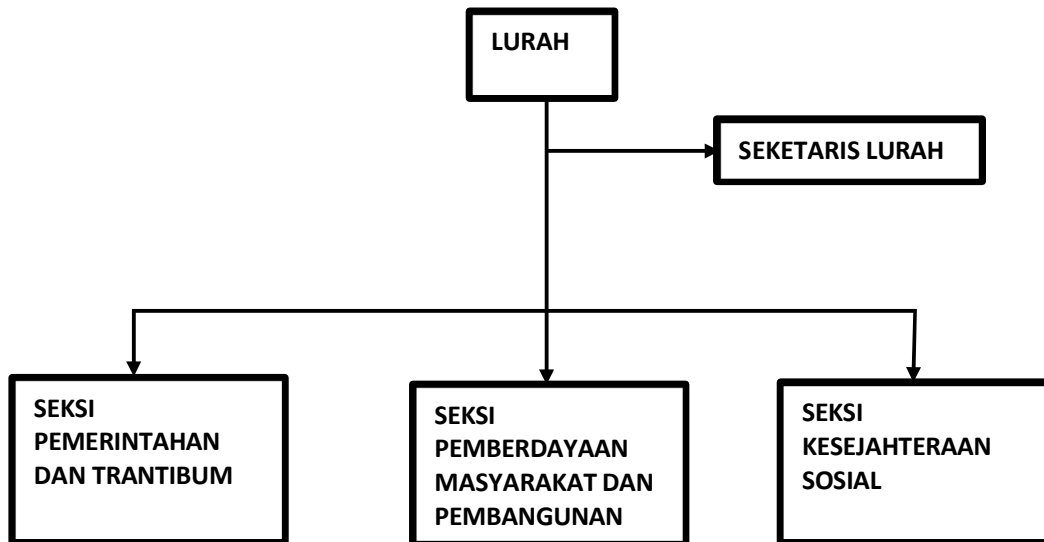
Sumber : Data aset Kecamatan Pondokgede Tahun 2025

Gambar 1.1.

### STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



### STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



Sumber : Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan Kota Bekasi.

### 1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

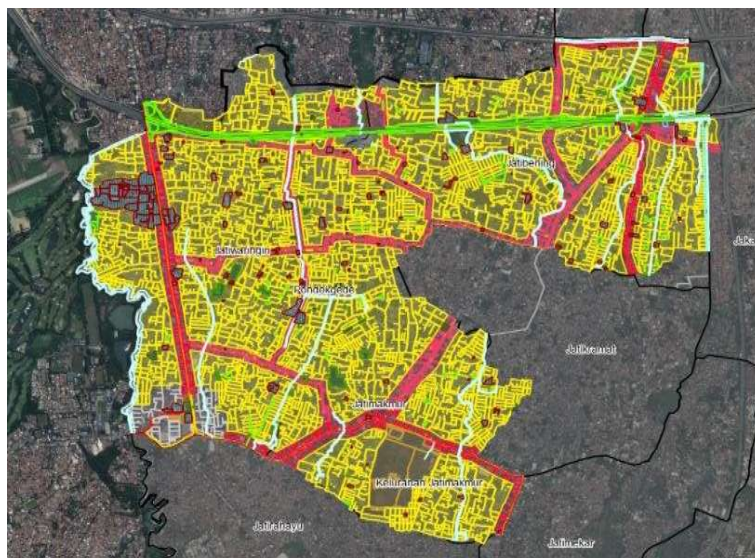
Secara geografis wilayah Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi terletak pada  $106.9258^{\circ}$  atau  $106^{\circ} 55' 33''$  Bujur Timur dan  $-6.27^{\circ}$  atau  $6^{\circ} 16' 12''$  Lintang Selatan. Secara geografis Pondokgede merupakan Kawasan perbatasan antara DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Kecamatan Pondokgede secara historis salah satu gabungan dari wilayah Pondok Melati, Jati Asih dan Jatisampurna.

Kecamatan Pondokgede memiliki Batas-Batas Wilayah Sebagai Berikut :

- Sebelah Timur : Kec.Jatiasih dan Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi.
- Sebelah Barat : Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar Jakarta Timur.
- Sebelah Utara : Kelurahan Cipinang Melayu Jakarta Timur.
- Sebelah Selatan : Kec.Pondokmelati Kota Bekasi

Luas wilayah Kecamatan Pondokgede adalah **1.592,246 Ha**

**Gambar 1.2.**  
**Peta Wilayah Kecamatan Pondokgede**





Kecamatan Pondokgede terdiri dari 78 RW dan 577 RT, dengan banyaknya wilayah perumahan berpengaruh pada kemajemukan masyarakatnya. Hal ini akan memacu pihak Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan untuk meningkatkan/penyediaan pelayanan sarana dan prasarana yang lebih baik dalam pemanfaatan tanah fasos/fasum yang disediakan oleh para pengembang perumahan di Kecamatan Pondokgede yang pengelolannya oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi mempunyai peranan penting sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Seksi Ketentraman Ketertiban dan Keamanan dan berkoordinasi dengan Kelurahan se-Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi.

Dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat, Kecamatan sebagai penyelenggara pemerintahan harus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sehingga secara maksimal memenuhi asas-asas pelayanan prima yaitu cepat, tepat, murah, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif. berkaitan dengan pelayanan publik yang akan di Kecamatan Pondokgede tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan pembangunan Kota Bekasi. Secara Khusus, Identifikasi permasalahan dihadapi pada tahun 2026, antara lain :

1. Adanya keterbatasan kompetensi dan pemahaman pada pemangku jabatan dan aparatur Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi, dalam menyusun dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Kurangnya komitmen yang tinggi dalam menerapkan wilayah tertib K3 di lingkungan Kecamatan Pondokgede, pentingnya komitmen dalam penertiban K3 berdampak pada peningkatan PAD Kota Bekasi;



3. Masyarakat masih banyak yang mengeluhkan prosedur administrasi yang panjang dan tidak efisien dalam mendapatkan layanan seperti KTP, KK. Dikarenakan masyarakat masih kurang mengerti tentang perkembangan teknologi informasi;
4. Keterbatasan infrastruktur pada jalan di wilayah Kecamatan Pondokgede mengakibatkan kemacetan yang cukup parah, di sebabkan oleh banyaknya kendaraan, dan kurangnya transportasi publik yang memadai, dan infrastruktur jalan yang terbatas.
5. Kurangnya Pengelolaan Drainase dan keberlanjutan lingkungan yang tidak optimal di wilayah Kecamatan Pondokgede, maka di wilayah Kecamatan Pondokgede sebagian mengalami Banjir yang cukup tinggi dikarenakan pengelolaan sampah yang buruk dapat menjadi masalah yang mempengaruhi kebersihan dan kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokgede;
6. Kurangnya Fasilitas Sarana untuk wanita dan kemasyarakatan.

#### **1.4 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI**

Tujuan dari Pelayanan publik adalah memberikan pelayanan yang memuaskan kepada seluruh masyarakat penerima layanan. Pada sektor publik layanan didasarkan kepada pelayanan adalah pemberdayaan masyarakat. sektor publik pelayanan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang terbaik.

Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pondokgede pada tahun 2025 terdiri dari 5 Program, 13 Kegiatan, 53 Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :



**Tabel 1.6.**  
**Program dan Kegiatan Kecamatan Pondokgede Tahun 2025**

No.	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
	<b>Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2025

No.	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Pnggunaan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pengadaan Mebel
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2025

No.	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
				Evaluasi Kelurahan
		<b>Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan
	<b>Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2025

No.	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
<b>KELURAHAN JATIWARINGIN</b>				
	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>		Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
	<b>Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2025

No.	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
	<b>KELURAHAN JATIMAKMUR</b>			
	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>		Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
	<b>Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2025

No.	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
	<b>KELURAHAN JATIBENING</b>			
	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>		Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
	<b>Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2025

No.	Program	Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
	<b>KELURAHAN JATICEMPAKA</b>			
	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>		Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
	<b>Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Sumber : Alokasi Anggaran 2025 dan hasil olahan dari tim Perencanaan Kecamatan Pondokgede 2025



Fungsi dari Masing-Masing Seksi yang ada di Kecamatan Pondokgede yaitu :

- a. Seksi Pemerintahan, menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi pembinaan pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan koordinasi pembinaan kelembagaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), memfasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan  
, memfasilitasi koordinasi pembinaan administrasi Kependudukan di Kelurahan.
- b. Seksi Kesejahteraan Sosial, menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi pembinaan kerukunan beragama, serta Pendidikan, kebudayaan dan Kesehatan masyarakat, pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam program kepemudaan, olahraga . melakukan koordinasi terkait pelaksanaan program Pendidikan kepada Perangkat Daerah dan memfasilitasi pendirian sarana Pendidikan kepada Perangkat Daerah.
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, melaksanakan pengoordinasian inventarisasi potensi bidang pemberdayaan masyarakat , mengkoordinasikan dan pembinaan Lembaga-lembaga kemasyarakatan/swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah kecamatan
- d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan , mengkoordinasikan pelaksanaan identifikasi, pendataan dan dokumentasi data bangunan Rumah Tinggal, mengkoordinasikan identifikasi dan inventarisasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keagaman konsumsi pangan masyarakat kepada Perangkat Daerah terkait , untuk membantu pelaksanaan pengawasan kelayakan UKM , mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan titik jalan dan memonitoring Saluran di lingkungan Kecamatan Pondokgede untuk di laporkan kepada Perangkat Daerah yang terkait.



- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, melakukan koordinasi dalam rangka penegakan hukum perda dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan, memberikan penyuluhan dalam rangka pemeliharaan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, melakukan koordinasi dengan tim penanggulangan bencana serta mengefektifkan pembuatan pos penanggulangan bencana dan pos keamanan lingkungan di setiap kelurahan di lingkungan Kecamatan Pondokgede.

## **1.5 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA**

Sistematika penyajian LKIP Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja**

##### **3.1.1. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA :**

##### **MENINGKATNYA LKM YANG Mendukung PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN PONDOKGEDE**

- a. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
- b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- c. Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase LKM aktif yang mendukung Pelayanan Publik



- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- e. Analisa Realisasi dan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

### 3.1.2. PERSENTASE PENINGKATAN KEPUASAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PONDOKGEDE

- a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Kinerja Tahun ini
- b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
- c. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa tahun terakhir
- d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029
- e. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa tahun terakhir
- f. Analisa Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Faktor Permalsahan
- g. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- h. Analisa atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya
- i. Infografis tentang Indeks Kepuasan Masyarakat dari 2 indikator Kinerja Utama

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



---

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan suatu proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan pada setiap tahunnya. Dalam rencana kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan adanya jadwal penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam waktu 1(satu) tahun.

Perencanaan Kinerja pada Kecamatan Pondokgede didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja antara Pj.Walikota Bekasi dan Camat Dimana didalam Perjanjian Kinerja tersebut terdiri atas 3 (Tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator Kinerja Sasaran. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2025. dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan/sub kegiatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2025-2029 memberi arah kebijakan terkait peningkatan tata kelola pemerintahan meliputi penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk didalamnya kecamatan. Selanjutnya dalam tahapan peningkatan tata kelola pemerintahan diarahkan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dapat mendukung pembangunan di Kota Bekasi. Pelaporan RPJMD.

Selanjutnya, memasuki periode laporan kinerja tahun 2025 yang bertepatan dengan masa jabatan Wali Kota Bekasi definitif hasil Pilkada serentak, terdapat penyesuaian strategis pada dokumen perencanaan. Hal ini berimplikasi pada sinkronisasi



indikator kinerja Kecamatan Pondokgede, di mana jumlah indikator kinerja sasaran mengalami simplifikasi dari 3 (tiga) indikator menjadi 2 (dua) indikator utama. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan fokus pencapaian target lebih tajam dan selaras dengan visi-misi kepala daerah yang baru serta prioritas pembangunan daerah tahun 2025.

## **2.1. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2025-2029 memberi mandat bahwa arah kebijakan peningkatan tata kelola pemerintahan meliputi penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk didalamnya kecamatan. Selanjutnya dalam tahapan peningkatan tata kelola pemerintahan diarahkan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dapat mendukung pembangunan di Kota Bekasi.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam dokumen RPJMD Kota Bekasi mempunyai tujuan dan sasaran yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pondokgede yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Pondokgede , Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Pondokgede dan Terwujudnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat di Kecamatan Pondokgede”. Berdasarkan RPJMD tersebut Kecamatan Pondokgede menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029.



### **2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Dalam Renstra Kecamatan Pondokgede terdapat tujuan dan sasaran Kecamatan Pondokgede beserta indikator. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran Kecamatan Pondokgede yaitu ,



### 2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dalam mengukur peningkatan kinerja di Kecamatan Pondokgede digunakan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Sedangkan untuk mengukur peningkatan layanan kepada masyarakat digunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, bahwa zona tertib, bersih dan indah perlu ditingkatkan untuk mewujudkan masyarakat berkeadilan dan menciptakan lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pondokgede ditetapkan sebagai berikut :



Gambar 2.1.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029

NO	NSPK DAN SASARAN RJPMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		ALASAN	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-						SUMBER DATA
				5	6					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1		Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Pondokgede		1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik		IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat / Survei Pelayanan Publik melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden.		85.53	85.70	85.90	86.00	86.20	86.40	86.60	
	Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern		1.1 Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokgede	1.1.1	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan Publik	Berdasarkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Persentase LKM aktif = Jumlah LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik/ Jumlah total LKM x 100%	1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;	0%	70%	72.50%	75%	77.50%	79%	81.50%	Hasil Perhitungan dan Pelaporan
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima		2.1 Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan Pondokgede	2.1.1	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Bedasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga dalam penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui IKM.	Nilai IKM tahun N - Nilai IKM tahun (N-1)/ Nilai IKM tahun (n-1) x 100 %	1. Seksi Pemerintahan; 2. Seksi Kesejahteraan Sosial; 3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 4. Sub Bagian Tata Usaha.	1%	1.08%	1.09%	1.10%	1.11%	1.12%	1.13%	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Sumber : Indikator Kinerja Utama Renstra Perubahan Kecamatan Pondokgede 2025 - 2029



## 2.2. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondokgede selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah selain itu dapat pula digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Pondokgede Tahun 2025 (Tabel 2.2.1) merupakan target kinerja tahun pertama dari Renstra Kecamatan Pondokgede 2025-2029, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi Kecamatan Pondokgede. Selanjutnya target kinerja tersebut dijabarkan dalam rinci sesuai dengan target kerja dalam lima tahun. Berikut adalah rincian pagu anggaran berdasarkan kebutuhan sesuai perjanjian kinerja 2025 dan tabel sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dicapai dalam Perjanjian Kinerja selama 5 tahun (Tabel 2.2.2).



**Tabel 2.1.**  
**Perjanjian Kinerja Kecamatan Pondokgede Tahun 2025**

<b>NO</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
1	Meningkatnya LKM yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokgede	Persentase LKM aktif yang mendukung pelayanan publik	70
2	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokgede	Persentase peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pondokgede	1.08

*Sumber : Lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Pondokgede Tahun 2025 hasil olahan tim perencanaan Kecamatan Pondokgede.*



**Gambar 2.2.**  
**Pagu Anggaran Kecamatan Pondokgede Tahun 2025**

No.	Program		Anggaran	Keterangan (APBD/PAD/DAU/HIBAH/dll.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	22.665.058.526.00	PAD dan DAU
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	240.000.000.00	PAD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	17.650.465.800.00	PAD dan DAU
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	RP	1.252.675.000.00	PAD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	RP	39.350.000.00	PAD
	<b>Total</b>		<b>41.847.553.326.00</b>	

Sumber olahan data : Lampiran Perjanjian Kinerja pada APBD perubahan tahun anggaran 2025 Kecamatan  
Pondokgede



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2025

**Tabel 2.3.**  
**Sasaran, indikator kinerja dan target kinerja per lima tahun**

NO.	SASARAN	INDIKATOR		DASAR PERATURAN / ALASAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA / SASARAN PADA TAHUN KE-					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokgede	1.1	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan	Berdasarkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	0%	70%	72.50%	75%	77.50%	79%	81.50%
2.	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan Pondokgede	2.1	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	bedasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga dalam penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui IKM.	1%	1.08%	1.09%	1.10%	1.11%	1.12%	1.13%

*Sumber olahan data : Diolah oleh tim perencanaan Kecamatan Pondokgede tahun 2025*



### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *Actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggung jawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi yang dilaksanakan Tahun 2025. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data capaian kinerja dari setiap indikator.



### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sasaran strategis utama Kecamatan Pondokgede adalah "Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Pondokgede". Indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Capaian Kinerja Organisasi Pondokgede ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mana tolak ukurnya adalah turunan dari IKU (Indikator Kinerja Utama).

Berikut adalah analisis mendalam mengenai capaian IKU tersebut disajikan kedalam tabel yang akan menjadi sebuah turunan dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihalaman selanjutnya.

**Tabel 3.1**  
**Target Capaian Kinerja menurut Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya LKM yang mendukung pelayanan publik di Kecamatan Pondokgede	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	Nilai	72.50%		70%
2.	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan pondokgede	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persen	1.09%		1.08%

*Sumber : Data Olahan tim perencanaan kecamatan pondokgede tahun 2025*

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 (tiga) sasaran strategis dan 2 (Dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Pondokgede tahun 2025-2029. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran strategis pertama yaitu Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja sebesar 70 persen.

Sasaran strategis kedua yaitu Meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan pondokgede memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja sasaran yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pondokgede dengan capaian kinerja sebesar 85.74 persen berdasarkan dari



Surat Keputusan Setda No. 000.8.3.4/Kep.205-SETDA.Org/XII/2025 dan hitungan per tri-wulan menjadi satu tahun dan telah naik 0.21 per sen dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2024.

Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Pondokgede telah melampaui target yang telah di tentukan di Renstra Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029.

### 3.2. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Capaian Kinerja Kecamatan Pondokgede Tahun 2025 sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diuraikan melalui pencapaian Indikator kinerja masing-masing sasaran strategis Kecamatan Pondokgede.

Sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pondokgede dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik, dapat di koordinasikan oleh 5 seksi dan 5 Kelurahan se- Kecamatan pondokgede.

**Tabel 3.2**

**Tabel Capaian indikator kinerja Kecamatan Pondokgede tahun 2025  
kecamatan Pondokgede.**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya LKM yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokgede	Presentase LKM aktif yang mendukung pelayanan publik	70%	100%	142.85%
2	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan di Wilayah Kecamatan Pondokgede	Persentase peningkatan kepuasan masyarakat di Kecamatan	1.08%	1.10%	101.85%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.2.2 Capaian Kinerja Kecamatan Pondokgede Tahun 2025 , secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan hasil yang sangat baik, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh



---

Kecamatan Bekasi Selatan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.

### **3.2.1. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA : MENINGKATNYA LKM YANG Mendukung PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN PONDOKGEDE**

Dalam rangka melaksanakan amanat Landasan Hukum Nasional (Payung Utama). UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah dan pelaksanaan otonomi. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: Menjadi dasar bahwa setiap pembangunan (termasuk yang dikelola LKM) harus terintegrasi dari tingkat bawah (Bottom-up). Permendagri No. 130 Tahun 2018: Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kelurahan. Ini adalah dasar utama mengapa LKM aktif sangat dibutuhkan untuk mengelola dana kelurahan. Landasan Perencanaan Daerah (Rencana Jangka Menengah) 2025-2029 Kota Bekasi.

Berpedoman pada kerangka regulasi tersebut, Pemerintah Kota Bekasi melalui Kecamatan Pondokgede telah menetapkan indikator Persentase LKM Aktif sebagai parameter keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pelayanan publik pada periode 2025-2029.

#### **A. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini**

Dikarenakan adanya sebuah peralihan dari RPD 2024-2026 ke RPJMD 2025-2029 maka fokus tujuan dari penjelasan sebuah hasil realisasi program dan pelaksanaan kegiatan dari persentase LKM aktif yang mendukung pelayanan publik hanya difokuskan kepada tahun 2025 dari RPJMD 2025/2029, dengan demikian penjabaran dari target dan realisasi kinerja capaian di tahun 2025 sebagai berikut :



**Tabel 3.3.**

**Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik	Nilai	-	85	-	85.74	-	100.85

*Sumber data : diolah oleh subbag tata usaha, perencanaan  
Kecamatan Pondokgede 2025*

Dengan melihat tabel tersebut diatas, capaian indikator kinerja yang kedua yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik pada Tahun 2025 mempunyai dengan target 85 dengan realisasi sebesar 85.74, maka capaian kinerja Tahun 2025 atas indikator Meningkatkan LKM yang Mendukung Pelayanan Publik sebesar 100 persen yang dapat diartikan capaian indikator Meningkatkan LKM yang Mendukung Pelayanan Publik pada Tahun 2025 telah melampaui target. Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual dan e-kuesioner (tautan dan kode QR) yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 (Sembilan) pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 ;

Capaian realisasi kinerja indikator Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik di tahun 2025 diperoleh dari kontribusi unsur LKM yang ada di wilayah Kecamatan Pondokgede dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3.4.

Data unsur LKM se-kecamatan Pondokgede

No.	Unsur LKM	Jumlah unsur LKM	Jumlah unsur LKM yang aktif	Kontribusi
1.	PKK	60	60	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kader PKK mendorong kemandirian pangan melalui memanfaatkan pekarangan untuk tanaman sayuran dan sumber protein, melakukan pelatihan pengelolaan makanan bergizi berbasis bahan baku lokal; - Kader PKK menyuplai data kondisi warga yang memenuhi kriteria rumah (sehat/kurang sehat), sumber air, jumlah jamban dsb</li></ul>
2.	Posyandu	60	60	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kader Posyandu menyuplai data by name by address mengenai balita stunting dan ibu hamil KEK (Kekurangan energi Kronis). Data ini diintegrasikan baik melalui WhatsApp Group dengan Puskesmas yang diintegrasikan ke Web Aksi Bangsa Kemendagri;</li><li>- Melaksanakan kegiatan posyandu setiap bulan (penimbangan bayi dan balita, pemeriksaan lansia, imunisasi dan pemeriksaan ibu hamil)</li></ul>
3.	LPM	5	5	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mensinkronkan data usulan pembangunan (Musrenbang) dengan kondisi lingkungan di wilayah kumuh / lokasi fokus stunting, sehingga perbaikan drainase atau sanitasi tepat lokasi.</li></ul>
4.	BKM	5	5	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan, serta menyediakan data basis ekonomi warga prasejahtera yang layak menerima dana bergulir.</li></ul>
5.	RW	78	78	<ul style="list-style-type: none"><li>- Laporan Aminduk PerTriwulan</li><li>- Pengelolaan sampah</li></ul>
6.	RT	577	577	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan verifikasi faktual door to door terhadap kondisi sosial ekonomi warga</li></ul>
Total unsur LKM		785	785	

Sumber : Data diolah oleh tim perencanaan Kecamatan Pondokgede tahun 2025



Berdasarkan hasil laporan dari beberapa unsur LKM sampai dengan akhir Desember 2025, maka capaian realisasi persentase LKM yang aktif mendukung pelayanan publik tentang operasional Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKM) di wilayah Kecamatan Pondokgede tahun 2025, tercatat tingkat partisipasi kelembagaan mencapai 100%. Dari total 785 unit unsur LKM yang tersebar di seluruh kelurahan, seluruhnya terverifikasi dalam status Aktif dan produktif.

**B. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

Capaian realisasi kinerja indikator Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik di tahun 2025 diperoleh dari kontribusi unsur LKM yang ada di wilayah Kecamatan Pondokgede dibagi menjadi beberapa tolak ukur yaitu indikator kinerja sasaran, satuan, target dan realisasi yang didapat

**Tabel 3.5.**  
**Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase LKM Aktif Yang Mendukung Pelayanan Publik**

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi
2	Persentase LKM aktif yang mendukung pelayanan publik	Persentase	70	100

*Sumber data : diolah oleh tim perencanaan Kecamatan Pondokgede*

Indikator Persentase Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) aktif yang mendukung Pelayanan Publik pada tahun 2025 berhasil mencapai realisasi 100%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 70%, perlu ditekankan bahwa meskipun indikator ini merupakan hasil perumusan baru dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029, namun secara faktual, berbagai unsur Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) di Kecamatan Pondokgede telah menunjukkan keaktifan dalam sinergi yang berkelanjutan bahkan dari tahun-tahun sebelumnya.

Penetapan indikator ini dalam dokumen perencanaan terbaru berfungsi



sebagai formalisasi atas praktik (*best practice*) yang telah berjalan. Mengingat rekam jejak aktifitas pendampingan pelayanan publik telah terdokumentasi dengan baik sejak awal tahun, maka realisasi kinerja pada akhir tahun 2025 memiliki basis data yang valid dan akuntabel untuk dihitung secara menyeluruh.

Keaktifan 100% secara keseluruhan unsur ini yang terdiri dari BKM, LPM, PKK, dan Posyandu serta RT/RW dan Posyandu memberikan sebuah pernyataan tegas dan efektif terhadap akurasi data yang dihimpun serta diolah. Sinergitas ini memastikan program prioritas walikota Bekasi dan Pemerintah Pusat dapat diksekusi dengan baik :

- Pengentasan Kemiskinan : validasi faktual dari RT/RW dan BKM meminimalisir kesalahan sasaran penerima manfaat bantuan sosial. Kemudian pengelolaan sampah di tingkat RW melibatkan warga lokal (sering kali kelompok masyarakat berpenghasilan rendah) sebagai petugas kebersihan atau pengelola Bank Sampah yang dibayar melalui iuran swadaya yang di kelola secara lebih professional berkat dukungan infrastruktur dana hibah.
- Pertumbuhan UMKM :  
LPM memfasilitasi pendataan UMKM lokal untuk mendapatkan legalitas usaha dan sertifikat halal, yang berdampak pada peningkatan produktivitas ekonomi wilayah
- Penurunan Stunting: data by name by address dari posyandu memastikan intervensi gizi tepat sasaran pada balita beresiko, kader PKK berperan sebagai fasilitator di tingkat keluarga yang mendorong kemandirian pangan di tingkat keluarga



### C. Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase LKM aktif yang mendukung Pelayanan Publik

**Tabel 3.6.**  
**Penghitungan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025**

No.	Indikator kinerja	Target tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Persentase peningkatan
1.	Persentase LKM aktif yang mendukung pelayanan publik	70%	100%	142.85%

*Sumber : data diolah oleh tim perencanaan Kecamatan Pondokgede*

Indikator yang menjadi sasaran utama kinerja Kecamatan Pondokgede lewat Renstra (2025-2029) telah mendapat pencapaian Kinerja sebesar 142.85% menunjukkan bahwa upaya inovasi LKM aktif yang mendukung pelayanan publik yang di lakukan di tahun 2025 memberikan hasil yang lebih baik dari yang ditargetkan. Kenyataannya masyarakat di lingkungan Kecamatan Pondokgede merasakan peningkatan kualitas pelayanan lewat LKM sebagai pendukung pelayanan publik jauh lebih signifikan.

### D. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

Dengan menyelaraskan RPJMN periode 2025-2029 program Pemerintah Kota Bekasi melalui RPJMD 2025-2029 memiliki kesesuaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bekasi terhadap program prioritas nasional yang juga merupakan bagian dari pembangunan nasional, SDM dan juga pelayanan publik di tingkat kota/kabupaten di Indonesia.

Bagian kesesuaian yang merupakan sama-sama menjadi pokok prioritas utama pembangunan Nasional di Kota Bekasi dengan RPJMN 2025-2029, yaitu :

1. Prioritas Nasional Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan :
  - Pemerintah Kota Bekasi membuat program pembangunan Rumah



Tidak Layak Huni (RUTILAHU) dari Pemerintah Kota Bekasi terhadap keluarga yang miskin ekstrem atau berpenghasilan rendah dibawah UMR/UMK .

2. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, yaitu :

- Menjaga keharmonisan kerukunan antar umat beragama melalui tokoh masyarakat bersinergi dengan Pemerintah Kota Bekasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia ,
- Program Bank Sampah di Kota Bekasi yang membantu untuk memaksimalkan pembuangan dan pemilahan sampah yang bernilai ekonomis untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup yang berkelanjutan .

3. Prioritas Nasional Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas :

- Pencegahan Baita stunting lewat program gizi baik Pemerintah Kota Bekasi kepada kepala keluarga penerima bantuan kurang mampu
- Indeks pembangunan keluarga lewat Program Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pemerintah Kota Bekasi.

#### **E. Analisa Realisasi dan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam indikator meningkatnya LKM yang mendukung layanan pelayanan publik di Kecamatan Pondokgede ditekankan kepada pemberdayaan masyarakat di bidang keorganisasian seperti Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang memiliki program kerja sebagai



mendukung efektifitas pelayanan publik di sektor pemberdayaan masyarakat adapun pogram kerjanya yaitu meningkatkan pembangunan SDM mengenai informasi dan pelatihan pelatihan keterampilan di masyarakat baik di tingkat Rukun tetangga (RT) , rukun warga (RW), Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan . pemberdayaan masyarakat selanjutnya yaitu organisasi pos pelayanan terpadu (POSYANDU) yang programnya adalah mengontrol dan mengedukasi perihal kesehatan kepada masyarakat sekitar di lingkungan Kecamatan Pondokgede yang terakhir adalah sebuah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, yakni yang dimaksud adalah sarana dan prasa

Tabel 3.7.

Realisasi anggaran dan analisa capaian serta efisiensi program kegiatan

Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu anggaran sudah Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi	Ket.
			(Rp)	(%)			
Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.650.469.800	17.541.385.350	99.38	100%	0.62%	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	17.330.469.800	17.231.920.800	99.43	100%	0.57%	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	150.000.000	148.529.100	99.02	100%	0.98%	Penyerapan Anggaran Sesuai dengan kebutuhan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatiwaringin)	200.000.000	200.000.000	100%	100%	-	Penyerapan Anggaran disesuaikan dengan pembangunan/ pemeliharaan infrastruktur
	Pembangunan	200.000.000	200.000.000	100%	100%	-	Penyerap



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2025

	Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatimakmur)						an Anggaran disesuaikan dengan pembangunan/pemeliharaan infrastruktur
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatibening)	200.000.000	200.000.000	100%	100%	-	Penyerapan Anggaran disesuaikan dengan pembangunan/pemeliharaan infrastruktur
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jaticempaka)	200.000.000	200.000.000	100%	100%	-	Penyerapan Anggaran disesuaikan dengan pembangunan/pemeliharaan infrastruktur
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatibening Baru)	200.000.000	200.000.000	100%	100%	-	Penyerapan Anggaran disesuaikan dengan pembangunan/pemeliharaan infrastruktur
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)	182.400.000	172.839.240	94,76	100%	5.24%	Penyerapan Anggaran Sesuai dengan kebutuha



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2025

							n
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatiwaringin)	3.167.092.600	3.159.824.160	99.77	100%	0.23%	Penyerapan Anggaran Sesuai dengan kebutuhan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatimakmur)	4.634.028.600	4.605.807.400	99.39	100%	0.61%	Penyerapan Anggaran Sesuai dengan kebutuhan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatibening)	2.903.105.000	2.902.813.400	99.99	100%	0.01%	Penyerapan Anggaran Sesuai dengan kebutuhan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jaticempaka)	2.937.265.400	2.937.068.900	99.99	100%	0.01%	Penyerapan Anggaran Sesuai dengan kebutuhan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatibening Baru)	2.306.578.200	2.305.038.600	99.93	100%	0.07%	Penyerapan Anggaran Sesuai dengan kebutuhan
	Evaluasi Kelurahan	50.000.000	-	-	-	-	Kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan evaluasi kinerja kelurahan dari tingkat kota ditiadakan
Persentase LKM Aktif yang	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	320.000.000	309.464.550	96,71	100%	3.29%	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2025

mendukung pelayanan publik	Tingkat Kecamatan						
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Kelurahan Jatiwaringin)	40.000.000	40.000.000	100%	100%	-	Penyerapan Anggaran Sesuai dengan kebutuhan
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Kelurahan Jatimakmur)	40.000.000	40.000.000	100%	100%	-	Penyerapan Anggaran Sesuai dengan kebutuhan
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Kelurahan Jatibening)	40.000.000	40.000.000	100%	100%	-	Penyerapan Anggaran Sesuai dengan kebutuhan
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Kelurahan Jaticempaka)	40.000.000	40.000.000	100%	100%	-	Penyerapan Anggaran Sesuai dengan kebutuhan
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Kelurahan Jatibening Baru)	40.000.000	40.000.000	100%	100%	-	Penyerapan Anggaran Sesuai dengan kebutuhan
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	120.000.000	109.464.550	91.22	100%	8.78%	Penyerapan Anggaran Sesuai dengan kebutuhan
Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.650.469.800	17.541.385.350	99.38	100%	0.62%	
	Kegiatan Pemberdayaan	17.330.469.800	17.231.920.800	99.43	100%	0.57%	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2025

	Kelurahan						
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	150.000.000	148.529.100	99.02	100%	0.98%	Penyerapan Anggaran Sesuai dengan kebutuhan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatiwaringin)	200.000.000	200.000.000	100%	100%	-	Penyerapan Anggaran disesuaikan dengan pembangunan/pemeliharaan infrastruktur
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatimakmur)	200.000.000	200.000.000	100%	100%	-	Penyerapan Anggaran disesuaikan dengan pembangunan/pemeliharaan infrastruktur
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatibening)	200.000.000	200.000.000	100%	100%	-	Penyerapan Anggaran disesuaikan dengan pembangunan/pemeliharaan infrastruktur
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jaticempaka)	200.000.000	200.000.000	100%	100%	-	Penyerapan Anggaran disesuaikan dengan pembangunan/



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2025

							pemeliharaan infrastruktur
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatibening Baru)	200.000.000	200.000.000	100%	100%	-	Penyerapan Anggaran disesuaikan dengan pembangunan/pemeliharaan infrastruktur
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)	182.400.000	172.839.240	94,76	100%	5.24%	Penyerapan Anggaran Sesuai dengan kebutuhan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatiwaringin)	3.167.092.600	3.159.824.160	99,77	100%	0.23%	Penyerapan Anggaran Sesuai dengan kebutuhan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatimakmur)	4.634.028.600	4.605.807.400	99,39	100%	0.61%	Penyerapan Anggaran Sesuai dengan kebutuhan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatibening)	2.903.105.000	2.902.813.400	99,99	100%	0.01%	Penyerapan Anggaran Sesuai dengan kebutuhan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jaticempaka)	2.937.265.400	2.937.068.900	99,99	100%	0.01%	Penyerapan Anggaran Sesuai dengan kebutuhan
	Pemberdayaan Masyarakat di	2.306.578.200	2.305.038.600	99,93	100%	0.07%	Penyerapan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2025

	Kelurahan (Kelurahan Jatibening Baru)					Anggaran Sesuai dengan kebutuha n
--	---	--	--	--	--	---

*Sumber data : Diolah oleh Perencanaan Kecamatan Pondokgede tahun 2025*

Secara keseluruhan, realisasi anggaran Kecamatan Pondokgede mencapai pada 98.95%. meskipun angka ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, terdapat beberapa kendala teknis dan administratif pada sub-kegiatan tertentu yang menyebabkan penyerapan tidak mencapai pada 100% , antara lain :

1. Kendala Administrasi dan Dokumentasi

Hambatan paling signifikan muncul dari sisi penata usahaan dokumen keuangan yang menjadi syarat pencairan anggaran, kurangnya dokumen pendukung dan kelengkapan SPJ tidak terpenuhi secara utuh, hal ini menunjukkan perlunya peningkatan ketertiban administrasi dalam pengarsipan bukti transaksi;

2. Keberhasilan kinerja dengan masyarakat

Program yang behubungan langsung dengan masyarakat menunjukkan capaian kinerja yang sangat presisi :

- a. Pemberdayaan Masyarakat dan LKM, Program Pemberdayaan di Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan (LPM/PKK) mencatatkan realisasi rata-rata diatas 99%;
- b. Honorarium Masyarakat, Pembayaran Honorarium bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, pkk, kader posyandu dan pkk berjalan dengan lancar sesuai dengan alokasi anggaran kas , menunjukkan tata kelola administrasi kemasyarakatan yang sudah tepat .

3. Penyerapan dan realisasi anggaran

Terdapat beberapa faktor kunci yang terlihat dari data dan pertanyaannya , Mengapa Anggaran Terealisasi dengan Baik ?

*Efektivitas Program Kewilayahan :*

Program besar seperti Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mencatatkan realisasi tinggi sebesar **99,38%**. Ini menunjukkan bahwa birokrasi mampu mengeksekusi dana hampir sepenuhnya untuk kepentingan publik.

*Ketepatan Pembangunan Fisik:* Seluruh sub-kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di berbagai kelurahan (Jatiwaringin, Jatimakmur, Jatibening, Jaticempaka, dan Jatibening Baru) mencapai realisasi 100%. Hal ini menunjukkan proyek infrastruktur selesai tepat waktu dan sesuai pagu. Sinkronisasi Kinerja dan Anggaran: Kolom Capaian Kinerja menunjukkan angka 100% di hampir semua lini.



Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan berhasil menghasilkan output yang direncanakan (tingkat efisiensi rata-rata di bawah 1%, yang berarti penggunaan anggaran sangat optimal/hemat namun tetap mencapai target). *Poin Anggaran yang Tidak Terserap (Kendala)* ; Meskipun secara umum sukses, terdapat satu poin anggaran yang sama sekali tidak terserap (**0%**): Evaluasi Kelurahan ; Pagu Anggaran: **Rp50.000.000**, Realisasi: **Rp0 (Nol)**. Keterangannya adalah Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena adanya kebijakan penghapusan evaluasi kinerja kelurahan dari tingkat kota. Ini adalah efisiensi yang bersifat administratif, bukan karena kegagalan teknis di kecamatan. Selain itu, terdapat beberapa poin dengan serapan yang belum mencapai **100%** (meski sudah di atas **90%**): Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat: Realisasi **91,22%** (terdapat sisa anggaran sekitar **Rp10,5 juta**). Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan): Realisasi **94,76%** (terdapat sisa sekitar **Rp9,5 juta**).

### **3.2.2. Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pondokgede**

Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pondokgede merupakan indikator kuantitatif yang mengukur seberapa besar kenaikan tingkat kepuasan warga di lingkungan Kecamatan Pondokgede terhadap pelayanan publik dan kondisi lingkungan dalam periode waktu tertentu.

#### **a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Kinerja Tahun ini**

Pada Tahun 2025, terjadi perubahan mendasar dalam cara pengukuran kinerja pelayanan publik. Jika pada tahun-tahun sebelumnya fokus utama hanya pada pencapaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara absolut, maka pada periode Renstra 2025-2029, Indikator Kinerja dipertajam menjadi Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan.

Perubahan ini dilakukan untuk menciptakan budaya kerja yang dinamis, dengan menargetkan “peningkatan”, aparatur Kecamatan Pondokgede dituntut untuk tidak sekadar mempertahankan standar yang ada, melainkan terus melakukan inovasi dan perbaikan kualitas layanan dari waktu ke waktu, Hasil perhitungan Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel di bawah



ini :

**Tabel 3.8.**  
**Perhitungan Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan**

Data Pendukung	Realisasi Tahun 2024 (N-1)	Realisasi Tahun 2025 (N)	Persentase Peningkatan
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pondokgede	85.53	86,43	1.10%

*Sumber Data : Nilai IKM Kecamatan Pondokgede Tahun 2024 dan 2025*

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Antara Target dan Relaisasi Kinerja Tahun 2025**

Indikator Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian 2025
Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	1.08%	1.10%	101,85%

*Sumber Data : Data Olahan Kasubag TU Kecamatan Pondokgede, 2025*

Penetapan target 1.08% untuk Indikator Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 tidak ditentukan secara acak. Angka ini merupakan hasil kalkulasi teknis yang didasarkan pada rata-rata kenaikan nilai IKM Kecamatan Pondokgede selama beberapa tahun sebelumnya.

Berdasarkan tren historis, kenaikan nilai kepuasan masyarakat biasanya bergerak secara linier dan perlahan. Target 1.08% mencerminkan proyeksi pertumbuhan "normal" atau moderat jika Kecamatan menjalankan pelayanan secara rutin seperti tahun-tahun lalu. Namun, dengan realisasi mencapai 101.85%, hal ini membuktikan bahwa strategi yang diterapkan pada tahun 2025 berhasil mematahkan tren linier tersebut.

Pencapaian yang melampaui rata-rata historis ini menegaskan bahwa kombinasi antara beberapa inovasi unggulan Kecamatan Pondokgede yaitu



Jempol Mas Poge, Jemput Bola Masyarakat Pondokgede, masifnya sosialisasi melalui Instagram dan website kecamatan Pondokgede, serta kemudahan akses SOP dan kontak pengaduan di website, telah menciptakan lompatan kualitas (aspek akselerasi) yang jauh lebih efektif dibandingkan pola pelayanan di tahun-tahun sebelumnya.

**b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Realisasi Kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.10.**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan dengan Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja sasaran	Satuan	Target			Realisasi		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83	85	-	88.70	85.53	-
2	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persen	-	-	1.08%	-	-	1.10%

*Sumber Data : Nilai IKM Kecamatan Pondokgede Tahun 2023, 2024 dan 2025*

Berdasarkan data pada Tabel ..., terlihat adanya tren positif dalam hal pelayanan kepada warga di Kecamatan Pondokgede. Meskipun cara pengukuran (indikator) mengalami penyesuaian pada tahun 2025, namun sumber datanya tetap konsisten menggunakan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Pada tahun 2023 dan 2024, performa pelayanan diukur menggunakan angka indeks. Dalam dua tahun tersebut, Kecamatan Pondokgede selalu berhasil melampaui target yang ditetapkan:

- Di tahun 2023, dari target 83, kita berhasil meraih nilai 88.70 (Capaian 106.86);
- Di tahun 2024, nilai tersebut merangkak naik menjadi 85.53 (Capaian 100.62). Ini menunjukkan bahwa standar pelayanan di Kecamatan Pondokgede sudah berada di level yang sangat baik secara konsisten.



Pada tahun 2025, fokus kinerja dialihkan dari sekadar "angka indeks" menjadi "persentase peningkatan". Hal ini dilakukan untuk memacu semangat aparatur agar tidak cepat puas dan terus melakukan inovasi. Hasilnya sangat luar biasa:

- Target Peningkatan : 1.08%;
- Realisasi Peningkatan : 1.10%.

Angka realisasi sebesar 1.10% ini merupakan "lompatan" besar. Artinya, upaya percepatan (akselerasi) pelayanan yang dilakukan di tahun 2025 memberikan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

### c. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa tahun terakhir

**Tabel 3.11.**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan dengan Tahun Lalu**

No	Indikator Kinerja sasaran	Satuan	Capaian (%)		
			2023	2024	2025
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	106.86	100.62	-
2	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persen	-	-	101.85%

*Sumber Data : Nilai IKM Kecamatan Pondokgede Tahun 2023, 2024 dan 2025*

Pencapaian Kinerja 101.85% menunjukkan bahwa upaya inovasi pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan di tahun 2025 memberikan hasil yang lebih baik dari yang ditargetkan. Kenyataannya masyarakat di lingkungan Kecamatan Pondokgede merasakan peningkatan kualitas pelayanan yang jauh lebih signifikan.

Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan tahun sebelumnya membuktikan bahwa Kecamatan Pondokgede tidak hanya sekedar "mempertahankan" kualitas, tetapi telah berhasil melakukan percepatan pelayanan yang luar biasa di tahun 2025. Keberhasilan ini menjadi bukti



nyata bahwa semangat melayani kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama bagi seluruh aparatur Kecamatan Pondokgede.

**d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029**

Capaian Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat tahun 2025 Jika dikaitkan dengan target Renstra Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 pada tahun 2025 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 3.12.**  
**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pondokgede Target Renstra 2025-2029**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pondokgede	
		2025	2029
Target	Persen	1.08%	1.12%
Realisasi	Persen	1.10%	-

Sumber data : diolah oleh tim perencanaan Kecamatan Pondokgede, tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas realisasi capaian 1.10% ini merupakan bukti bahwa inovasi pelayanan terhadap masyarakat yang produktif, terjangkau, dan menyelesaikan masalah terkait pelayanan terhadap masyarakat langsung sampai selesai, secara signifikan dapat meningkatkan Kualitas dan Kepuasan terhadap masyarakat. Program tersebut berhasil menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat akan pelayanan administrasi, pendidikan, dan kesehatan, sehingga langsung dirasakan manfaatnya dan terefleksi dalam lonjakan angka kepuasan yang jauh melampaui ekspektasi.



**e. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa tahun terakhir**

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, tidak tercantum target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat., namun terdapat target indikator Indeks Pelayanan publik (IPP) baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Kota. Meskipun IKM dan IPP berbeda, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah salah satu komponen dalam penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP). Dalam evaluasi IPP yang dilakukan oleh Kemenpan-RB, salah satu unsur yang dinilai adalah “Kebijakan Pelayanan” dan “Konsultasi Pengaduan”, dimana hasil survei IKM sering kali dijadikan data dukung untuk membuktikan bahwa kebijakan tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Target IPP tahun 2025 dalam RPJMN 2025-2029 adalah 3.68, dan Indeks Pelayanan Publik Kota adalah 3.96. Sepanjang tahun 2025, unsur pengaduan mendapat nilai paling tinggi, diikuti dengan biaya dan sarpras. Ini menunjukkan konsultasi pengaduan dan kebijakan terkait pengadaan sarpras dan kampanye gratis administrasi telah berhasil. Ini dapat menunjang nilai IPP tingkat Kota.

**Tabel 3.13.**

**Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Pondokgede Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan dengan Standar Nasional (RPJMN Tahun 2025-2029)**

No	Renstra Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 (Perubahan Renja 2025)						RPJMN 2025-2029		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sasaran	Indikator	Target 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokgede	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persentase	1.08%	1.10%	101.85%		- Indeks Pelayanan Publik	3.68
								- Indeks Pelayanan Publik Kota	3.96

Sumber data : diolah oleh perencanaan Kecamatan Pondokgede tahun 2025



#### **f. Analisa Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Faktor Permalsahan**

Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan untuk dapat mendukung capaian Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pondokgede sebagai berikut :

##### **1. Inovasi Program yang tepat sasaran**

**Jempol Mas Poge** menjawab kebutuhan dasar pelayanan administrasi yang sering dikeluhkan (birokrasi lambat, antrian panjang). Solusi ini langsung mengurangi keluhan masyarakat di lingkungan Kecamatan Pondokgede.

##### **2. Konvergensi Layanan Multi-Sektor**

Ketiga Program mencakup Sosial, Pendidikan, dan Kesehatan merupakan 3 (tiga) aspek utama kualitas hidup. Hal ini memperluas dampak dan menjangkau berbagai segmen yang berada di masyarakat.

Adapun faktor permasalahan/penghambat keberhasilan yang telah atau mungkin terjadi antara lain :

##### **1. Keberlanjutan (Sustainability)**

Ketergantungan pada SDM dan Dana: Program inovatif sering bergantung pada semangat beberapa pegawai dan anggaran khusus. Jika tidak diinstitusionalisasi, bisa mandek saat ada rotasi pegawai atau pemotongan anggaran.

Kejenuhan Warga bisa menjadi penyebab penurunan partisipasi apabila pelayanan tidak berkembang.

##### **2. Kapasitas Beban Kerja**

Penambahan program tanpa penambahan SDM dapat menyebabkan kelebihan beban kerja pegawai kecamatan, berpotensi menurunkan kualitas layanan utama lainnya.

##### **3. Minimnya Standarisasi dan Replikasi**

Keberhasilan sangat bergantung pada individu penggerak di Kecamatan Pondokgede. Tanpa standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi, program sulit direplikasi di kecamatan lain atau dipertahankan jika pimpinan berganti.

##### **4. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan Prasarana yang kurang memadai untuk masyarakat dalam



mendapatkan pelayanan, akan tetapi pada tahun ini akan dilakukan perbaikan ruang pelayanan agar masyarakat semakin nyaman dalam mendapatkan pelayanan di Kecamatan Pondokgede.

#### **5. Waktu Pelayanan yang singkat**

Dengan memberikan kemudahan persyaratan kepada masyarakat mendorong pelayanan dapat dilakukan dengan waktu yang singkat, warga Kecamatan Pondokgede memperoleh fasilitas jemput bola yang ada dalam SOP Pelayanan Kecamatan Pondokgede melalui petugas PAMOR Kecamatan Pondokgede. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran bagi warga Kecamatan Pondokgede untuk senantiasa memperbarui data perubahan jika terdapat penambahan dan pengurangan warga serta dapat berkonsultasi kepada petugas PAMOR Kecamatan Pondokgede terkait masalah administrasi kependudukan.

Adapun rekomendasi untuk keberlanjutan program inovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat antara lain menjadikan program inovasi yang ada sebagai program unggulan di Kecamatan Pondokgede dengan membuat SOP Pelayanan Publik, mengalokasikan anggaran, menetapkan indikator program kerja pada Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede.

Keberhasilan yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa peningkatan kepuasan masyarakat dapat melonjak ketika intervensi pemerintah bersifat langsung, nyata, dan multidimensi. Namun tanpa strategi keberlanjutan yang matang, kuncinya adalah mengubah inovasi yang digerakkan oleh individu menjadi sistem yang tertanam dalam budaya organisasi pada Kecamatan Pondokgede.



**g. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, Realisasi Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan**

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, indikator ini menggunakan 4 Program dan 11 Kegiatan, yang terdiri dari 1 Program (BLPU) dan 3 Proram (BLU).

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pondokgede Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.14.**  
**Program/Kegiatan menunjang Indikator Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pondokgede Tahun Anggaran 2025**

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
				(Rp)	(%)		
Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.362.196.520	22.665.058.526	21.031.132.809	92.79	100%	7.21%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	7.800.000	7.650.000	98.08	100%	1.92%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	7.800.000	7.650.000	98.08	100%	1.92%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.928.710.000	16.223.751.000	14.990.592.180	92.42	100%	7.58%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.913.710.000	16.219.751.000	14.990.592.180	92.42	100%	7.58%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	4.000.000	3.960.400	99.01	100%	0.99%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	151.239.800	102.338.800	49.731.900	48.60	50%	51.40%
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	41.239.800	41.239.800	34.731.900	84.22	100%	15.78%
	Pendidikan dan Pelatihan	30.000.000	19.125.000	15.000.000	78.43	100%	21.57%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2025

Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80.000.000	41.974.000	-	-	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	487.000.000	464.092.000	388.321.896	83.67	100%	16.33%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	20.000.000	18.217.232	91.09	100%	8.91%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	280.000.000	262.092.000	222.483.534	84.89	100%	15.11%	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	75.000.000	75.000.000	64.716.135	86.29	100%	13.71%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	50.000.000	38.240.000	76.48	100%	23.52%	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000	12.000.000	11.832.495	98.60	100%	1.40%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	25.000.000	15.905.000	63.62	100%	36.38%	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.000	20.000.000	16.927.500	84.64	100%	15,36%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	250.000.000	72.205.000	66.300.001	91.82	100%	8.18%	
Pengadaan Mebel	50.000.000	28.756.000	27.765.001	96.55	100%	3.45%	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000	43.449.000	38.535.000	88.69	100%	11.31%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.982.246.720	5.278.058.226	5.080.817.273	96.26	50%	3.74%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	430.000.000	430.000.000	329.643.144	76.66	100%	23.34%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.547.246.720	4.843.058.226	4.751.174.129	98.10	100%	1.90%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	548.000.000	516.813.500	443.759.159	85.86	100%	14.14%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	108.000.000	108.000.000	88.619.300	82.05	100%	17.95%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	165.000.000	165.000.000	115.271.000	69.86	100%	30,14%	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2025

Dinas Operasional atau Lapangan							
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000	43.813.500	41.300.000	94.26	100%	5,74%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	200.000.000	198.568.859	99.28	100%	0,72%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	240.000.000	240.000.000	212.782.762	89%	100%	11%	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	210.000.000	210.000.000	188.714.012	90%	100%	10%	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kecamatan)	60.000.000	60.000.000	57.361.012	95.60	100%	4.40%	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatiwaringin)	30.000.000	30.000.000	27.265.000	90.88	100%	9.12%	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatimakmur)	30.000.000	30.000.000	17.801.000	59.34	100%	40.66%	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatibening)	30.000.000	30.000.000	28.870.000	96.23	100%	3.77%	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jaticempaka)	30.000.000	30.000.000	28.550.000	95.17	100%	4.83%	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait	30.000.000	30.000.000	28.867.000	96.22	100%	3.78%	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2025

dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatibening Baru)							
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	30.000.000	30.000.000	24.068.750	80.23	100%	19.77%	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	30.000.000	30.000.000	24.068.750	80.23	100%	19.77%	
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.258.625.000	1.252.675.000	1.205.223.095	96%	100%	4%	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.258.625.000	1.252.675.000	1.205.223.095	96%	100%	4%	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	64.500.000	64.500.000	56.459.490	87.53	100%	12.47%	
Harmonisasi Hubungan dengan tokoh dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kecamatan)	358.125.000	352.175.000	314.763.605	89.38	100%	10.62%	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatiwaringin)	156.400.000	156.400.000	156.000.000	99.74	100%	0.26%	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatimakmur)	192.400.000	192.400.000	192.000.000	99.79	100%	0.21%	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatibening)	144.400.000	144.400.000	144.000.000	99.72	100%	0.28%	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jaticempaka)	198.400.000	198.400.000	198.000.000	99.80	100%	0.20%	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatibening Baru)	144.400.000	144.400.000	144.000.000	99.72	100%	0.28%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50.000.000	39.350.000	37.125.000	94.35	100%	5.65%	
Penyelenggaraan Urusan	50.000.000	39.350.000	37.125.000	94.35	100%	5.65%	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2025

	Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	39.350.000	37.125.000	94.35	100%	5.65%
TOTAL	25.910.821.520	24.197.083.526	22.486.263.666	93%	86%	7%	

*Sumber Data : Siencang e-monev Kecamatan Pondokgede Tahun 2025, TW I s.d TW IV*

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 4 (Empat) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan, 36 (Tiga Puluh Enam) Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan, dengan Pagu Anggaran Sebelum Perubahan **Rp.25.910.821.520**, mengalami perubahan Pagu Anggaran sebesar **Rp.24.197.083.526**, dengan tingkat realisasi anggaran sebesar **Rp.22.486.263.666**, dengan persentase realisasi anggaran sebesar 93%, yang terbagi dari 4 (Empat) Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp.24.362.196.520**, mengalami perubahan pagu anggaran sebesar **Rp.22.665.058.526**, tingkat realisasi anggaran sebesar **Rp. 21.031.132.809** dengan persentase sebesar **92.79%**;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar **Rp.240.000.000**, tingkat realisasi anggaran sebesar **Rp.212.782.762** dengan persentase sebesar **89%**;
3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar **Rp.1.258.625.000**, mengalami perubahan pagu anggaran sebesar **Rp.1.252.675.000**, tingkat realisasi anggaran sebesar **Rp.1.205.223.095** dengan persentase sebesar **96%**;

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp.50.000.000, mengalami perubahan pagu anggaran sebesar Rp.39.350.000, tingkat realisasi anggaran sebesar Rp. 37.125.000 dengan persentase sebesar 94.35%;

Jika dihubungkan dengan pencapaian realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan dengan Realisasi 1.10% dari target nilai sebesar 1.08% atau dengan capaian kinerja sebesar 101,85%, pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tahun 2025 tidak dilakukan refocusing anggaran dikarenakan untuk menunjang



sarana dan prasarana meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, akan tetapi terdapat efisiensi anggaran yang mencapai 7% pada Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 7,21%, pada Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4% ,pada Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum 5.65% yang dimana pada 4 program tersebut keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan cukup signifikan sehingga anggaran yang dialokasikan tidak terserap 100%.

#### **h. Analisa atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya**

Capaian Kinerja Kecamatan Pondokgede di tahun 2025 tidak dicapai dengan besarnya anggaran yang ada, melainkan karena kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya secara efektif, tepat guna dan efisien. Kecamatan Pondokgede memanfaatkan potensi sumber daya manusia (SDM) yang ada secara maksimal untuk memberikan dampak yang besar bagi masyarakat.

Efisiensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Pondokgede di tahun 2025 ini bukan sekedar memotong anggaran, tetapi memastikan setiap aset baik itu personil, teknologi, maupun hubungan dengan lembaga memberikan nilai tambah yang nyata. Berikut ini merupakan pilar utama efisiensi yang menjadi kunci sukses pada Kecamatan Pondokgede yaitu :

1. Pemanfaatan Pamor pada setiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Pondokgede dan Program Jempol Mas Poge, Pamor (Petugas Pemantau Monitoring dan Evaluasi) di Kelurahan merupakan ujung tombak yang sangat efisien dalam program Jempol Mas Poge (Jemput Bola Masyarakat Pondokgede). Dengan menempatkan layanan di tingkat RW dan RT, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi dan waktu untuk ke Kantor Kecamatan atau Kelurahan. Ini menurunkan biaya bagi masyarakat. Pamor juga bertindak sebagai validator data, pendamping masyarakat, sekaligus kurir dokumen layanan terhadap masyarakat;
2. Sinergitas antar 3 Pilar, kolaborasi antara Camat, Kapolsek dan Danramil meminimalkan hambatan birokrasi lintas sektoral. Sinergi ini memastikan program fisik seperti penataan lingkungan RW Bekasi Keren berjalan tanpa gangguan keamanan. Masalah sosial yang kompleks (seperti sengketa lahan atau sampah liar) diselesaikan dalam satu meja koordinasi, menghemat waktu birokrasi yang biasanya berbelit;
3. Pemanfaatan teknologi (WhatsApp dan Website SP4N-LAPOR), penggunaan platform digital yang sudah familiar dimasyarakat menciptakan efisiensi tanpa biaya investasi infrastruktur yang besar. Penggunaan WhatsApp menjadi kanal tercepat untuk koordinasi internal dan layanan pengaduan informal.

Kecepatannya dalam merespon keluhan warga secara langsung berkontribusi pada poin “Penanganan pengaduan sarana dan masukan” dalam unsur pelayanan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Penggunaan SP4N-Lapor memastikan setiap pengaduan terdokumentasi dan memiliki target waktu penyelesaian yang jelas. Ini menciptakan transparansi yang meningkatkan kepercayaan publik.

#### i. Infografis tentang Indeks Kepuasan Masyarakat dari 2 indikator Kinerja Utama

Grafik infografis terhadap presentase indikator sasaran kinerja utama di Kecamatan Pondokgede indikator ini ditunjukkan dengan angka realisasi capaian pada 142,85% yang mana angka tersebut dihasilkan dari 100% laporan kinerja para LKM yang melaporkan kegiatan tersebut, hasil dari penghitungannya adalah realisasi dibagi oleh target  $100\% : 70\% = 142,85\%$ . Hasil angka presentase ini menunjukkan bahwa indikator kinerja Presentase LKM aktif yang mendukung pelayanan publik telah menunjukkan pada hasil yang memuaskan.

**Gambar 3.2**

#### Infografis tentang Indeks Kepuasan Masyarakat dari 2 indikator Kinerja Utama



Sumber data : diolah oleh tim perencanaan kecamatan pondokgede tahun 2025.



Presentase peningkatan kepuasan masyarakat di Kecamatan Pondokgede di tahun 2025 menunjukkan pada angka **101.85%**, yang mana hasil tersebut adalah dari penghitungan dari realisasi dibagi oleh target dan hasilnya menunjukkan pada angka **1,10%** . Angka ini menunjukkan bahwa grafik ada peningkatan dari tahun sebelumnya, angka **0,02 %** di tahun 2025 dari target yang ditentukan adalah di angka **1,08%**. Artinya untuk segmentasi indikator Presentase Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pondokgede telah mencapai pada predikat memuaskan.



## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2026.

**Tabel 4.1.**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

<b>Indikator Utama</b>	<b>Target 2025</b>	<b>Realisasi 2025</b>	<b>Persentase Capaian 2025</b>
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pondokgede	85.53	86,43	1.10%
Persentase LKM aktif yang mendukung pelayanan publik	70%	100%	142.85%
Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	1.08%	1.10%	101,85%

*Sumber Data : Data olahan tim perencanaan Kecamatan Pondokgede, 2025*

### 4.1 KESIMPULAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan



gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2025 - 2029, instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Pondokgede atas penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2025 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Pondokgede telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Pondokgede telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2025 ini Kecamatan Pondokgede memiliki 2 (tiga) sasaran strategis serta 2 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target. Sementara apabila dibandingkan dengan target perencanaan (dalam hal ini renstra tahun 2025-2029), maka terlihat bahwa pada tahun 2025 ini hampir keseluruhan target yang telah ditetapkan telah tercapai, bahkan ada beberapa yang melebihi target. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 terpenuhi sesuai dengan harapan.

Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sudah tercapai dan tidak ada mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan



pada tahun 2025.



#### 4.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan capaian kinerja Kecamatan Pondokgede Tahun 2024, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan sehingga meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya mengingat Tahun 2024 adalah tahun pertama periode Renstra 2024- 2026. Beberdapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya :

1. LKIP Kecamatan Pondokgede merupakan hasil pertanggung jawaban instansi pemerintah atas kinerja yang telah dicapai, oleh karena itu penyusun berharap adanya dukungan kerjasama antara berbagai pihak khususnya di Kecamatan Pondokgede agar terjalin komunikasi yang baik;
2. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi terutama dalam penyusunan Program yang ada di Kecamatan Pondokgede agar dapat mempertimbangkan perkembangan isu strategis/perubahan regulasi lokal, regional, dan nasional, sehingga dapat dengan cepat dilakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan dari Walikota kepada Camat;
3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur. Di samping mekanisme pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh dalam menghasilkan capaian kinerja yang berkualitas, hal penting lainnya adalah kapasitas sumberdaya aparatur yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
4. Melaksanakan Komunikasi terkait dengan seluruh ketua RW melalui FKRW se Kecamatan Pondokgede secara berkala;
5. Meningkatkan kualitas data dan informasi atas capaian kinerja. Capaian kinerja yang dikumpulkan sesuai dengan SOP pengumpulan data merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan yang selaras dengan dokumen Renstra Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 serta RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Capaian kinerja yang dikumpulkan sesuai dengan SOP pengumpulan data kinerja merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan yang selaras dengan dokumen Renstra Kecamatan Pondokgede 2025-2029 serta RPJMD Kota



Bekasi Tahun 2025-2029.

Dalam hubungan ini masyarakat umum perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran pembangunan melalui Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 -2026 mulai perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan dan kecamatan, berperan serta dalam monitoring dan evaluasi pembangunan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang lebih baik lagi.

Demikian kami sampaikan, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang. Untuk program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Kecamatan Pondokgede pada Tahun 2025 menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan dimasa yang akan datang sehingga tidak mempengaruhi terhadap capaian kinerja Kecamatan Pondokgede secara keseluruhan dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah sesuai target/kategori baik selama Tahun 2025 agar tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan akuntabilitas kinerja oleh seluruh aparatur di Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan dalam tugas dan pengabdian kita.



Dalam hubungan ini masyarakat umum perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 -2029 mulai perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan dan kecamatan, berperan serta dalam monitoring dan evaluasi pembangunan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang lebih baik lagi.

Demikian kami sampaikan, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang. Untuk program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Kecamatan Pondokgede pada Tahun 2025 menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan dimasa yang akan datang sehingga tidak mempengaruhi terhadap capaian kinerja Kecamatan Pondokgede secara keseluruhan dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah sesuai target/kategori baik selama Tahun 2025 agar tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan akuntabilitas kinerja oleh seluruh aparatur di Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan dalam tugas dan pengabdian kita.